

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIMAH



<https://cimah.kota.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2017

<https://cimahikotapbps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2018

ISSN	:	-
Nomor Publikasi	:	3277
Katalog BPS	:	
Ukuran Buku	:	17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	:	x + 82 halaman
Naskah	:	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Cover	:	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh	:	Badan Pusat Statistik Kota Cimahi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2018

Tim penyusun

Pengarah : Drs Erwan Syahriza

Penanggung Jawab : Dra Tien Trina Sulistiawati

Naskah :
1. Dra Tien Trina Sulistiawati
2. Windi Pramudyawardani, S.ST

Cover Luar : Seksi Statistik Neraca dan Analisis Statistik

Penyunting :
1. Drs Erwan Syahriza
2. Dra Tien Trina Sulistiawati

Halaman Kosong

<https://cimahikota.bps.go.id>

Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2017 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi yang menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cimahi tahun 2018. Publikasi ini berisi berbagai data yang bersumber dari data BPS yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2017, Sakernas, dan proyeksi Penduduk 2010-2025.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut 8 bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Cimahi, Desember 2018

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi

Erwan Syahriza

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xv
1. Kependudukan	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk	5
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan .	6
1.4 Fertilitas	9
1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama	9
1.6 Penggunaan Alat/cara KB	11
2. Kesehatan dan Gizi	13
2.1 Derajat dan Status kesehatan penduduk	13
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	16
2.3 Pemanfaatan Fasilitas tenaga Kesehatan	19
3. Pendidikan	23
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	23
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah..	25
3.3 Tingkat Pendidikan	26

3.4	Partisipasi Sekolah (APM dan APK)	27
4.	Ketenagakerjaan	31
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	32
4.2	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	36
4.3	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	41
4.4	Sektor Formal dan Sektor Informal	45
5.	Taraf dan Pola Konsumsi	49
6.	Perumahan dan Lingkungan	55
6.1	Kualitas Rumah Tinggal	56
6.2	Fasilitas Rumah Tinggal	59
6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal	61
7.	Kemiskinan	63
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin	65
7.2	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	66
7.3	Karakteristik Pendidikan	68
7.4	Karakteristik Ketenagakerjaan	70
7.5	Karakteristik Perumahan	72
7.6	Fasilitas yang Diterima Rumah Tangga Miskin	74
8.	Sosial Lainnya	75
8.1	Perjalanan Wisata	76
8.2	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	77
8.3	Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis	79
8.4	Tindak Kejahatan	81
	LAMPIRAN	83

Daftar Tabel

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017	4
Tabel 1.2 Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017	6
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2017-2017	15
Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Hari Sakit dan Rata-rata Lama Sakit (hari) di Kota Cimahi, 2017-2017	16
Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2017	21
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2017	24
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2017	29
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2017	30
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Cimahi, 2016 – 2017	39

Tabel 4.2	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2016 – 2017	41
Tabel 4.3	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2016 – 2017	46
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2017	50
Tabel 5.2	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Kelompok Makanan Sebulan Menurut Sub Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2017	52
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Indikator Kualitas Perumahan, 2015 dan 2017	56
Tabel 6.2	Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2015 -2017	59
Tabel 6.3	Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2015 -2017	62
Tabel 7.1	Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Raskin, Rata-rata Raskin dan Rata-rata Harga di Kota Cimahi, 2017	74
Tabel 8.1	Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2015 dan 2017	79
Tabel 8.4	Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan, 2015 dan 2017	81

Daftar Grafik

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2013-2017	2
Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi, 2017	3
Grafik 1.3 Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2017	7
Grafik 1.4 Angka Beban Ketergantungan di Kota Cimahi, 2017	8
Grafik 1.5 Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kota Cimahi, 2017-2017	10
Grafik 1.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2017-2017	12
Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (tahun), 2013-2017	14
Grafik 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2017	17
Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi, 2017-2017	18
Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017	20

Grafik 3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (tahun), 2011-2017	25
Grafik 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2017	27
Grafik 3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2017-2017	28
Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja Di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015	33
Grafik 4.2	Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2017	34
Grafik 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 .	35
Grafik 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 .	36
Grafik 4.5	Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, Agustus 2014-2015	37
Grafik 4.6	Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Cimahi, Agustus 2015	40
Grafik 4.7	Struktur Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Perkotaan Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 .	42
Grafik 4.8	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 ..	43
Grafik 4.9	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015	44
Grafik 4.10	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Status Kegiatan Formal Informal di Kota Cimahi, Agustus 2015	47
Grafik 5.1	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2017	51
Grafik 5.2	Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2012 – 2017	53
Grafik 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2015 dan 2017	58

Grafik 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2010-2017	65
Grafik 7.2	Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2010 – 2017	66
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cimahi 2010 - 2017	67
Grafik 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kota Cimahi, 2013 - 2017	68
Grafik 7.5	Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2015 – 2017	69
Grafik 7.6	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2015 – 2017	70
Grafik 7.7	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2015 – 2017	71
Grafik 7.8	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Perkapita di Kota Cimahi, Tahun 2015	72
Grafik 8.1	Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan, Tahun 2017	76
Grafik 8.2	Persentase Penduduk yang Melakukan Kegiatan Berpergian Menurut Maksud Utama Melakukan Berpergian Tahun 2017	77
Grafik 8.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah/PSTN Tahun 2017	78
Grafik 8.4	Persentase penduduk Menjadi Korban Kejahatan Sejak Maret 2014 – Februari 2017	82

1. Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan Negara.

Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

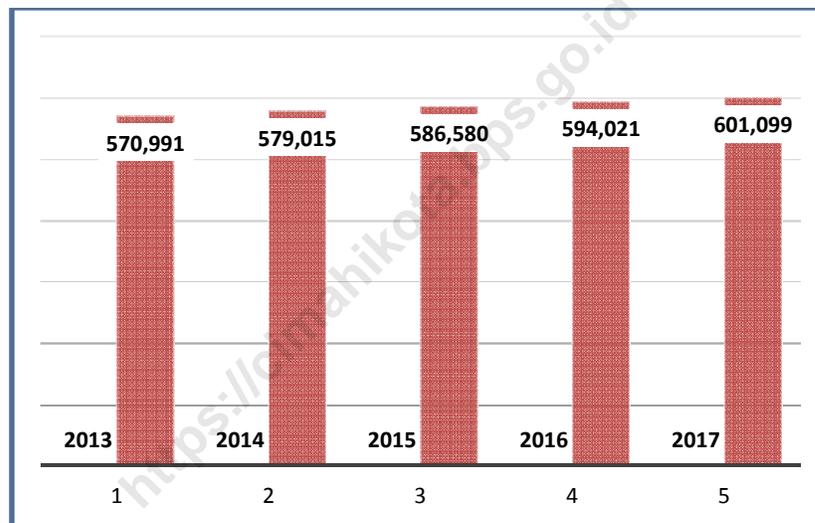
Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2020, jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 601.099 jiwa pada tahun 2017.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Jumlah

penduduk Kota Cimahi tahun 2017 adalah 601099 jiwa (proyeksi BPS). Dengan penduduk yang besar maka pemerintah tidak akan kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan penduduknya baik material maupun rohaniannya. Masalah-masalah lain akan timbul seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

**Grafik 1.1. Jumlah Penduduk di Kota Cimahi
Tahun 2013-2017**



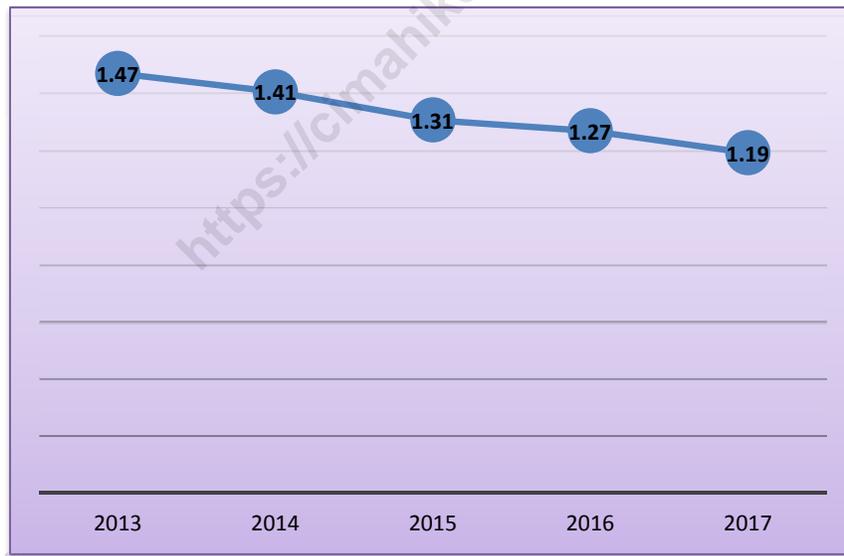
Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 570.991 jiwa mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen pada tahun 2017 atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 7.078 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak 594.021 jiwa pada

tahun 2017 tersebar di tiga kecamatan di Kota Cimahi, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 258.203 jiwa, kecamatan Cimahi tengah sebanyak 172.366 jiwa dan Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 163.462 jiwa.

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2013 hingga tahun 2017, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,19 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,47 persen mengalami penurunan menjadi 0,28 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi, 2013-2017



Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Laju pertumbuhan penduduk di kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2017 secara umum juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 3 kecamatan yang ada di Kota Cimahi terdapat 2 kecamatan yang berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara. Sedangkan 1 kecamatan memiliki laju pertumbuhan penduduk di bawah laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Tengah.

Tabel 1.1. Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Cianjur	0,52	0,45	0,38	0,32	0,29
Kabupaten Tasikmalaya	0,57	0,49	0,43	0,36	0,29
Kota Bandung	0,57	0,50	0,43	0,37	0,29
Kota Tasikmalaya	0,54	0,48	0,41	0,32	0,27
Kota Banjar	0,56	0,45	0,50	0,28	0,27

Sumber : *Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020*

Apabila ditelaah lebih lanjut di Kota Cimahi, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi selaras dengan jumlah penduduknya juga banyak. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Cimahi bagaimana menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut supaya tidak menjadi

masalah yang semakin besar di kemudian harinya. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Jawa Barat maka lju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi tergolong sedang. (Tabel 1.1)

1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Apabila kita lihat sebaran penduduk di kecamatan di Kota Cimahi, terlihat bahwa penduduk Kota Cimahi terpusat di 1 kecamatan yaitu kecamatan Cimahi Selatan. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di Kecamatan di Kota Cimahi, terlihat di wilayah 1 kecamatan lebih padat dibanding kecamatan lainnya, yaitu kecamatan Cimahi Selatan. Dari Tabel 1.2 terlihat 3 kecamatan dengan kepadatan penduduk 14.953 jiwa per km². Kecamatan Cimahi Selatan dengan jumlah penduduk 261 940 Jiwa dengan kepadatan penduduk 15 499 jiwa per km², Kecamatan Cimahi Tengah dengan jumlah penduduk 173 756 orang lebih kecil dar jumlah penduduk kecamatan Cimahi Selatan tetapi menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan mencapai 17.375 jiwa per km²., sementara kecamatan Cimahi Utara dengan jumlah penduduk 165 403 orang mempunyai tingkat kepadat terendah yaitu 12.436 jiwa per km².

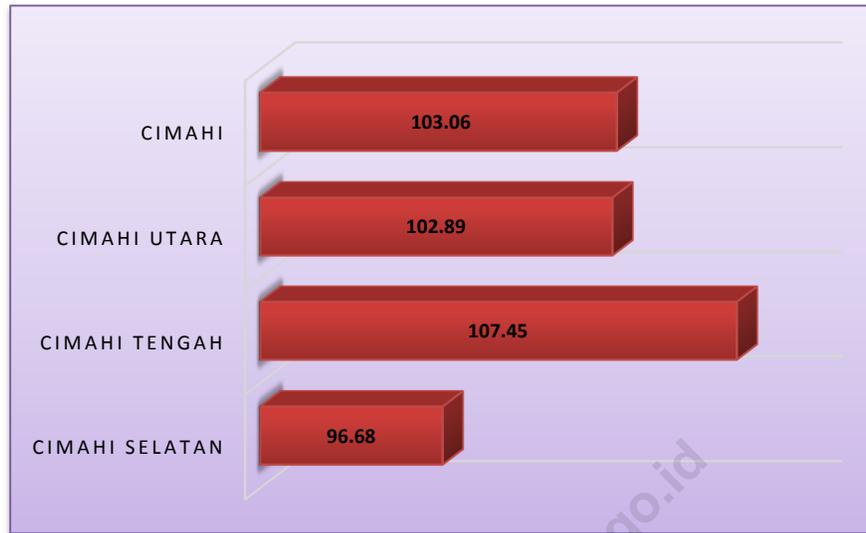
Tabel 1.2. Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Cimahi Selatan	43,58	15 499
2.	Cimahi Tengah	28,91	17 375
3.	Cimahi Utara	27,52	12 436
Kota Cimahi		100,00	14 953

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Grafik 1.3. Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2017

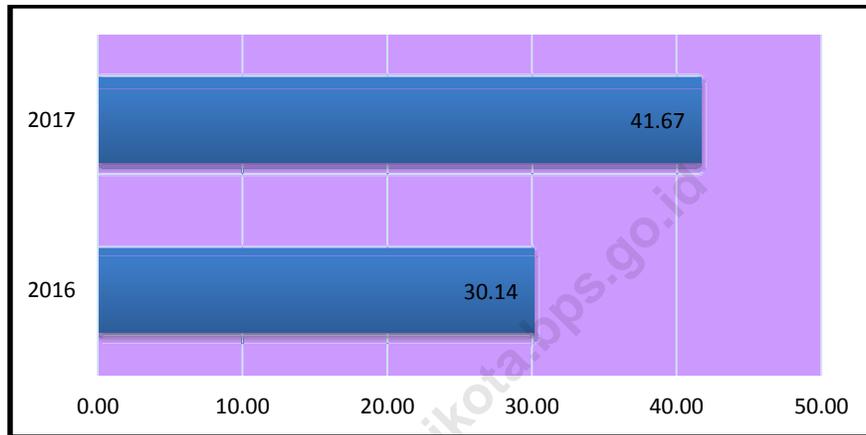
Sumber : Susenas, Maret 2016

Komposisi penduduk Kota Cimahi jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2017 sebesar 103,06. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Apabila kita lihat rasio jenis kelamin perkecamatan di Kota Cimahi, maka dari 3 Kecamatan terdapat 1 Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu Rasio jenis kelamin terkecil pada Kecamatan Cimahi selatan dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,68. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kecamatan tersebut jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk

usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Grafik1.4. Angka Beban Ketergantungan di Kota Cimahi, 2017



Sumber : Susenas, Maret 2017

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 41,67. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

1.4 Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang

tinggi bisa menyebabkan penambahan penduduk di suatu wilayah, ledakan jumlah penduduk akan terjadi apabila angka fertilitas yang tinggi tetapi angka mortalitas atau kematian yang rendah.

Menurut Ida Bagus Mantra (1985), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non demografi. Faktor-faktor demografi antara lain struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, keperidian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-faktor non demografi antaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

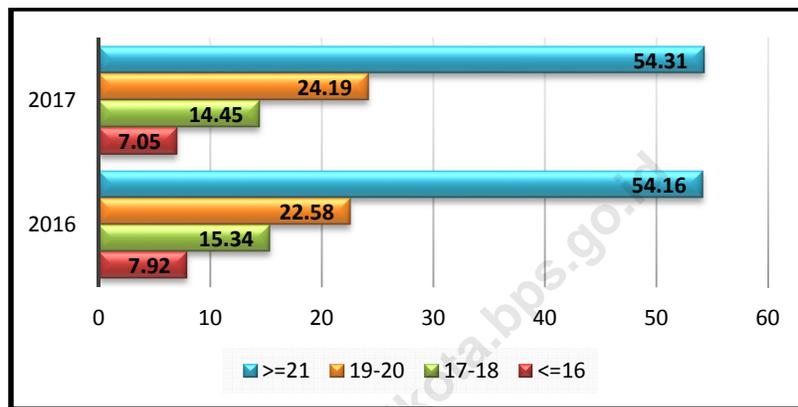
1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama

Usia Kawin Pertama bisa dijadikan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi

dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB melalui menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Grafik1.5. Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kota Cimahi, 2016-2017



Sumber : Susenas, Maret 2017

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, sebagian besar wanita di Kota Cimahi melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 21 tahun yaitu sebesar 54,31 persen, pada tahun sebelumnya yang paling banyak wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 21 tahun yaitu sebesar 54,16 persen.

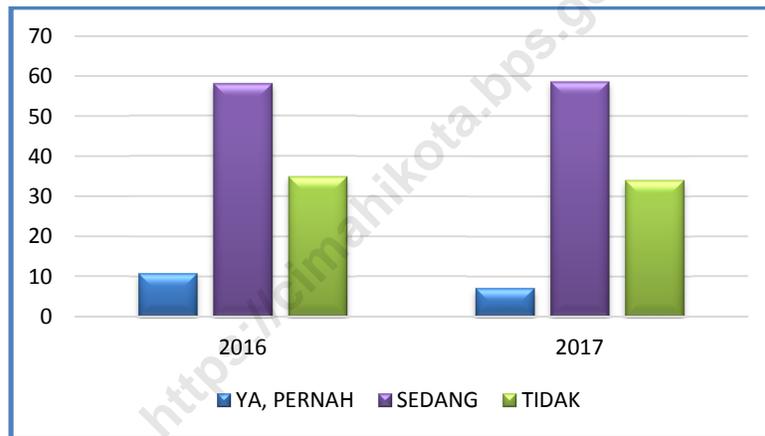
Yang perlu kita telaah lebih lanjut yaitu wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun. Persentase wanita Kota Cimahi berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 7,05 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,22 persen. Padahal pada usia 10-16 tahun

tersebut seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

1.6 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Grafik 1.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2016-2017



Sumber : Susenas, Maret 2016

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017 di Kota Cimahi, penggunaan alat KB oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin digunakan oleh 58,70 persen. Sementara yang tidak pernah menggunakan 34,08 persen dan yang pernah menggunakan 7,22 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya persentase wanita yang menggunakan alat KB lebih banyak yaitu 10,93 persen.

2. Kesehatan & Gizi

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di suatu wilayah merupakan salah satu rujukan melihat tingkat kesehatan di wilayah tersebut.

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menurunkan Angka kematian Bayi dan Balita, tidak hanya terfokus pada kewajiban pemerintah saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat

mengenai kesehatan sangatlah penting, khususnya pengetahuan ibu dalam merawat bayi dan balitanya.

Dimensi kesehatan tidak hanya Angka Kematian Bayi dan Balita, tetapi juga bisa dilihat dari Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2013 hingga 2017, Kota Cimahi telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,4 tahun. Pada tahun 2013, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Cimahi hanya sebesar 73,56 tahun, dan pada tahun 2017 telah mencapai 73,61 tahun. Semakin meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cimahi mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (tahun), 2013-2017



Sumber : IPM, 2017

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan

semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Persentase penduduk Kota Cimahi yang menderita sakit pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 52,98 persen, padahal sebelumnya hanya sebesar 51,42 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk yang sakit baik laki-laki maupun perempuan hampir sama besar. Penduduk laki-laki yang menderita sakit sebesar 51,77 persen dan penduduk perempuan sebesar 52,21 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2016-2017

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2016	50,36	49,64	52,44	47,56	51,42	48,58
2017	51,77	48,23	54,21	45,79	52,98	47,02

Sumber : Susenas, Maret 2017

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan yang dialami penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 5 hari. Penduduk di Kota Cimahi paling banyak mengalami sakit selama 1 sampai 3 hari yaitu sebesar 51,78 persen, sementara persentase yang mengalami sakit selama 4 sampai 7 hari sebanyak 36,62 persen. Penduduk yang mengalami sakit selama 22 sampai

30 hari yaitu 11,61 persen, jika dilihat dari persentasenya cukup besar yaitu persentase yang sakitnya sekitar 3 hari menggambarkan bahwa semakin banyak lama jumlah hari sakit maka penyakit yang dialami semakin serius, data tersebut dapat dilihat dari tabel 2.2.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Hari Sakit dan Rata-rata Lama Sakit (hari) di Kota Cimahi, 2016-2017

No	Tahun	Jumlah hari sakit (Persen)					Rata-Rata lamanya Sakit
		≤ 3	4-7	8-14	15 - 21	22 - 30	
1	2016	38,06	45,50	7,97	2,35	6,12	6,75
2	2017	51,78	36,62	7,15	1,73	2,72	5

Sumber : Susenas, Maret 2017

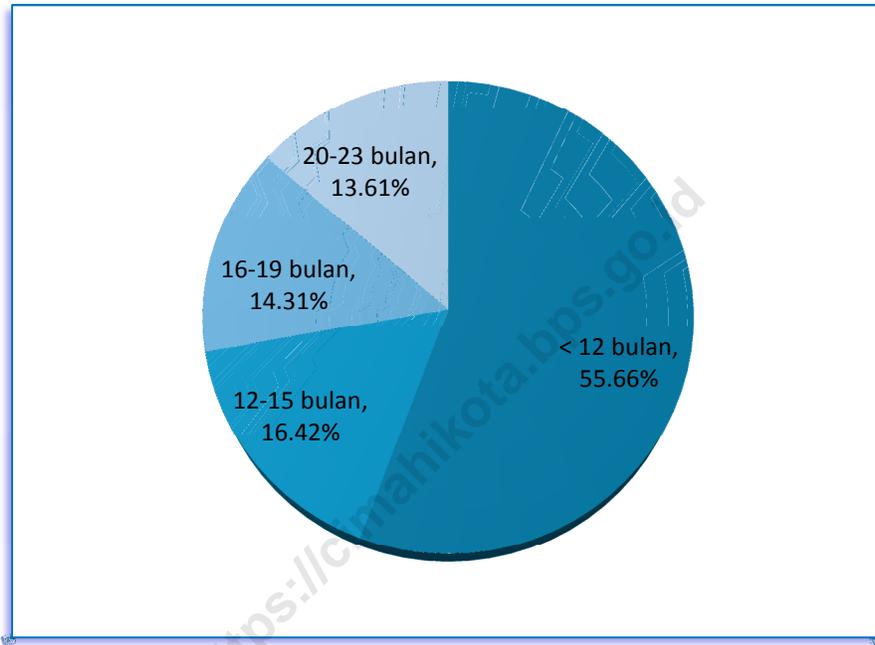
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal (WHO 2001; Prasetyono, 2009). Selain itu peningkatan program ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Air Susu ibu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang sangat dibutuhkan bayi untuk jangka panjang dalam proses tumbuh kembang. ASI memiliki nutrisi terbaik

dan zat-zat berkualitas tinggi yang bisa memberikan antibodi dan tingkat kecerdasan untuk bayi.

Grafik 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2016



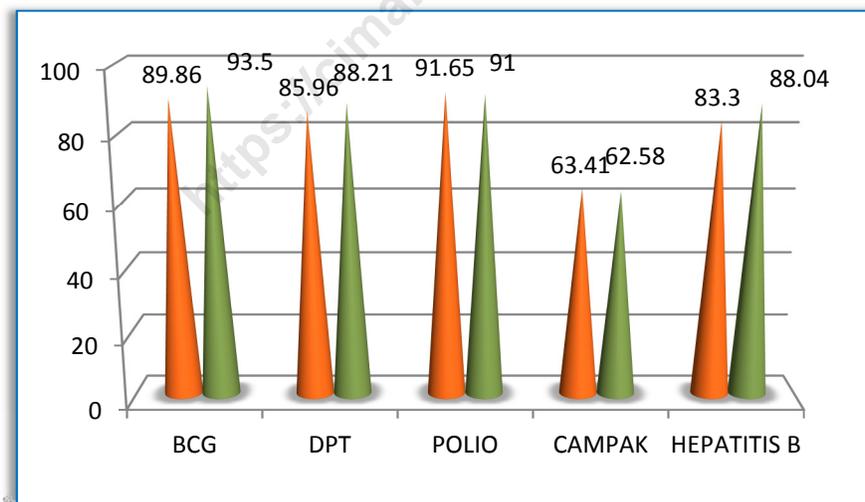
Sumber: Susenas Maret 2016

Sangat dianjurkan seorang ibu dapat menyusui selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan yang lebih kuat pada bayi. Di Kota Cimahi pada tahun 2016, rata-rata lama bayi disusui selama 10 bulan. Persentase paling besar yaitu anak yang disusui sampe 12 bulan atau 1 tahun, yaitu sebesar 55,66 persen, kemudian yang disusui selama 12 hingga 15 bulan sebesar 16,42 persen, sedangkan

yang disusui selama 16-19 bulan dan 20-23 bulan masing-masing sebesar 14,31 persen dan 13,61 persen.

Selain ASI hal yang sangat diperlukan bagi kesehatan anak dan tingkat kekebalan tubuh anak adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap suatu penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik ataupun tetes. Di Indonesia imunisasi ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B, sedangkan beberapa imunisasi yang dianjurkan seperti Typus, influenza, MMR dan masih banyak lagi.

Grafik2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi,2016-2017



Sumber: Susenas Maret 2017

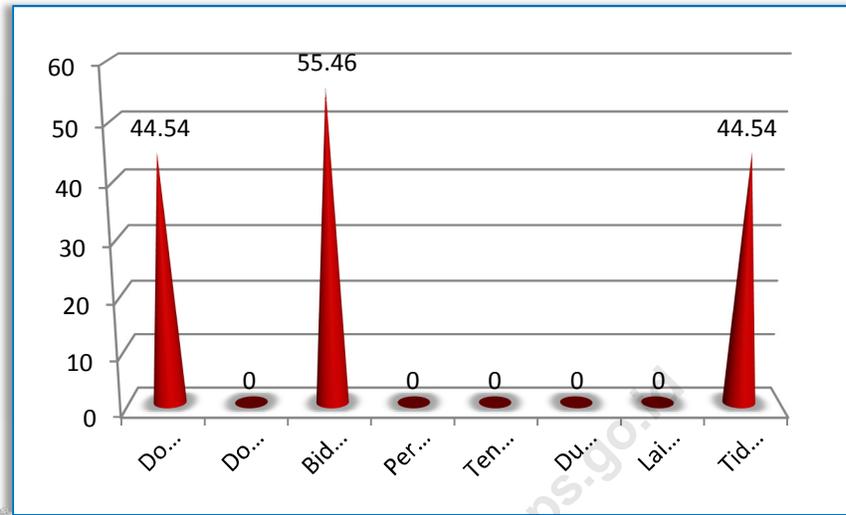
Berdasarkan hasil Susenas 2017, Hampir semua balita yang ada di Kota Cimahi pernah mendapatkan imunisasi wajib, hal ini terlihat dari Grafik 2.3 di atas, bahwa lebih dari 70 persen balita mendapat imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Pada tahun 2017 persentase terbesar adalah imunisasi BCG sebesar 93,50 persen.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi fasilitas tenaga kesehatan sangatlah penting, tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting karena bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program-program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Secara umum dilihat dua tahun terakhir, di Kota Cimahi persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin jika dilihat dari penolong proses kelahirannya, paling banyak ditolong oleh bidan, yaitu lebih dari 55,46 persen. Sementara itu proses kelahirannya dibantu oleh dokter kandungan pada tahun 2017 sebesar 44,54 persen.

Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017



Sumber : Susenas, Maret 2017

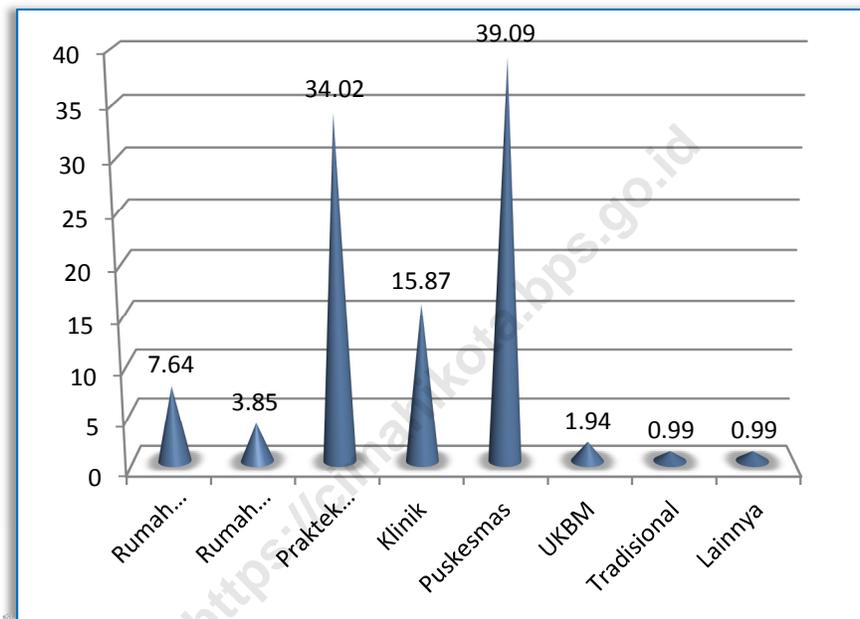
Di Kota Cimahi sudah tidak ada lagi penolong kelahiran oleh dukun beranak/paraji, hal ini bisa disebabkan oleh berkembangnya faktor pendidikan ibu, faktor budaya dan faktor ekonomi keluarga.

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan tidak hanya penolong persalinan, tetapi juga fasilitas tempat berobat. Pemanfaatan fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal. Jarak rumah ke tempat berobat sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan dimana mereka akan berobat.

Menurut data Susenas 2017 yang diperoleh, ada beberapa tempat berobat yang jadi pilihan masyarakat untuk berobat jalan selama sebulan terakhir, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/bidan, klinik, Puskesmas, UKBM, dan praktek pengobatan tradisional.

Dari beberapa tempat berobat tersebut, di Kota Cimahi persentase terbesar penduduk berobat di puskesmas yaitu sebesar 39,09 persen, kemudian diikuti oleh praktek dokter/bidan sebesar 34,02 persen.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

3. Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber

daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2017 persentasenya sangat besar yaitu 97,46 persen.

Apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sedikit lebih besar dari pada perempuan, penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis sebesar 97,14 persen dan perempuan sebesar 97,78 persen. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi yang bisa membaca dan menulis huruf arab juga sangat besar yaitu sebesar 69,16 persen laki-laki dan sebesar 71,57 persen perempuan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2017

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Laki-laki	97,14	69,16	2,77	-
2 Perempuan	97,78	71,57	2,02	-
Total	97,46	70,36	2,39	-

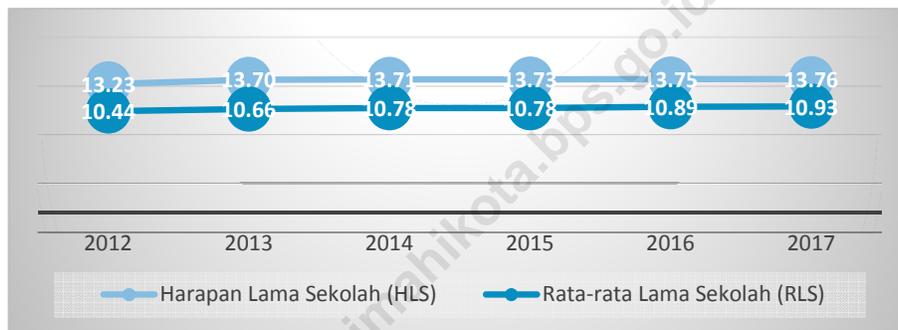
Sumber : Susenas, Maret 2017

Berdasarkan data hasil Susenas 2017, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi yang buta huruf sudah tidak ada.

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah meningkat sebesar 0,53 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,49 tahun.

Grafik 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (tahun), 2012-2017



Sumber : IPM, 2017

Selama periode 2012 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,76 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2.

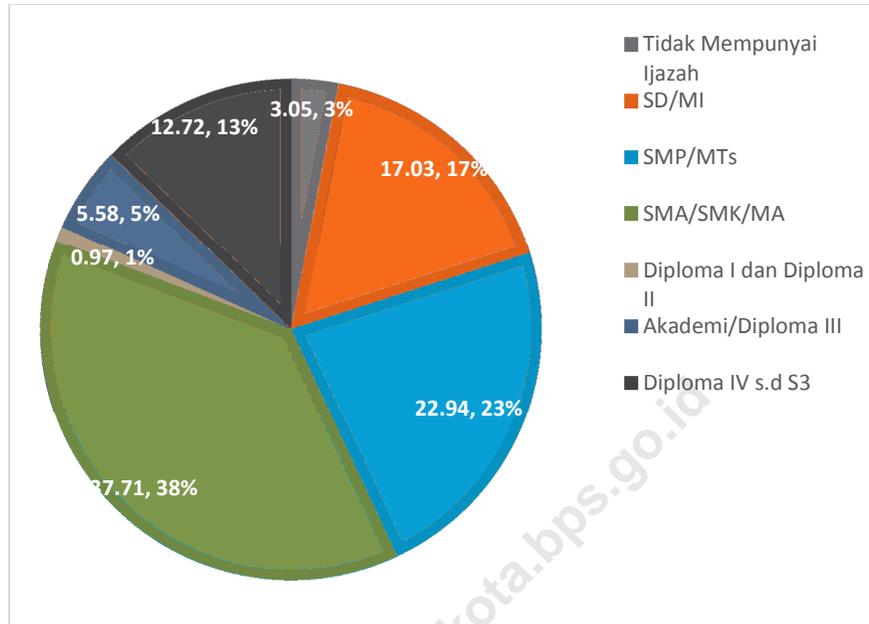
Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2012 hingga 2017. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Cimahi yang lebih baik. Hingga tahun 2017, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau SMP kelas II (Grafik3.2).

3.3 Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas Sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Berdasarkan data hasil Susenas 2017, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi persentase paling besar yang memiliki ijazah tertinggi adalah ijazah SMA/Sederajat atau bisa dikatakan tamat SMA/Sederajat yaitu sebesar 37,71 persen, kemudian SMP/Sederajat yaitu sebesar 22,94 persen dan SD/Sederajat sebesar 17,03 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan masih terus digalakkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2017



Sumber : Susenas, Maret 2017

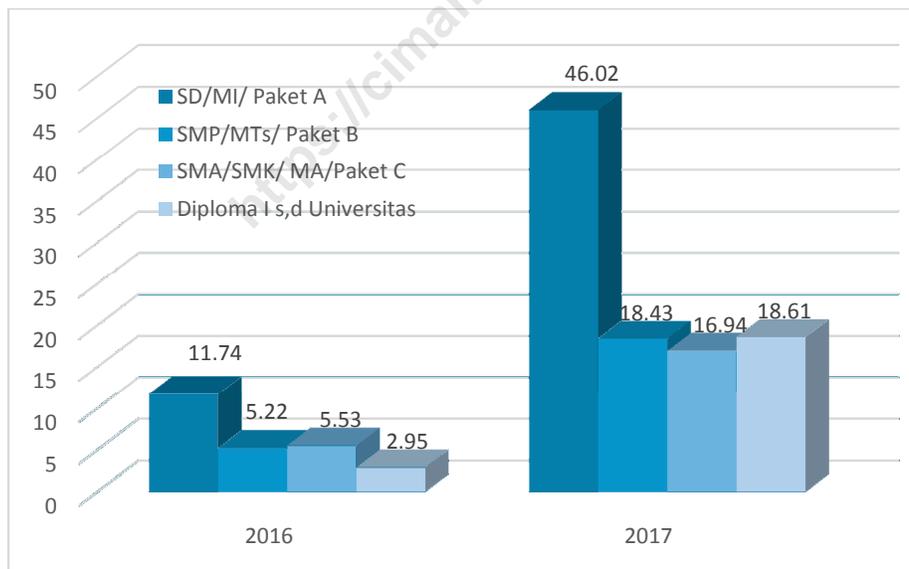
3.4 Partisipasi Sekolah (APM dan APK)

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Untuk penduduk berumur lima tahun ke atas yang masih bersekolah pada dua tahun terakhir di Kota Cimahi persentase terbesar juga pada tingkat setara SD yaitu sebesar 11,74 persen pada tahun 2016 dan 46,02 persen pada tahun 2017. Sedangkan yang masih bersekolah di tingkat Diploma I/ Universitas persentasenya paling kecil yaitu sebesar 2,95 persen pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 18,61 persen pada tahun 2017.

Grafik 3.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2016-2017



Sumber : Susenas, Maret 2017

Angka Partisipasi Sekolah yang dilihat melalui kelompok umur, Angka Partisipasi Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, SD, SMP maupun SMA. Secara umum di Kota Cimahi APM SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMP dan SMA, hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2017**

Jenjang Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD/MI Sederajat	97,63	105,58
SMP/MTs Sederajat	77,68	82,04
SMA/SMK/MA Sederajat	69,61	91,89

Sumber : Susenas, Maret 2017

4 Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2015 dan 2017 kondisi Agustus, sedangkan data tahun 2016 tidak tersedia karena survei tidak dilaksanakan. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),

persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

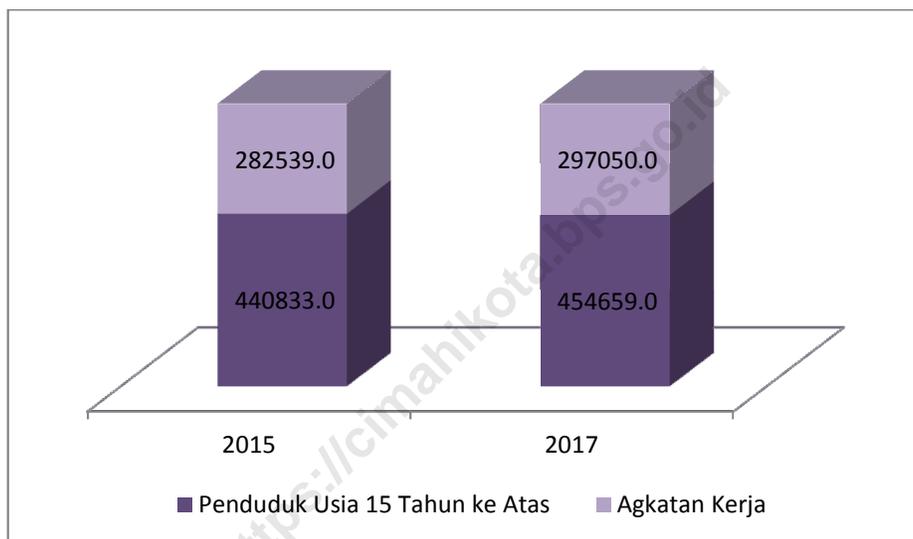
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi Agustus 2017 sebanyak 454.659 orang, bertambah sebanyak 13.826 orang

dibandingkan Agustus 2015. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2017 mencapai 297.050 orang, bertambah sebanyak 14.511 orang dibanding Agustus 2015.

Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Cimahi, Agustus 2015 – 2017

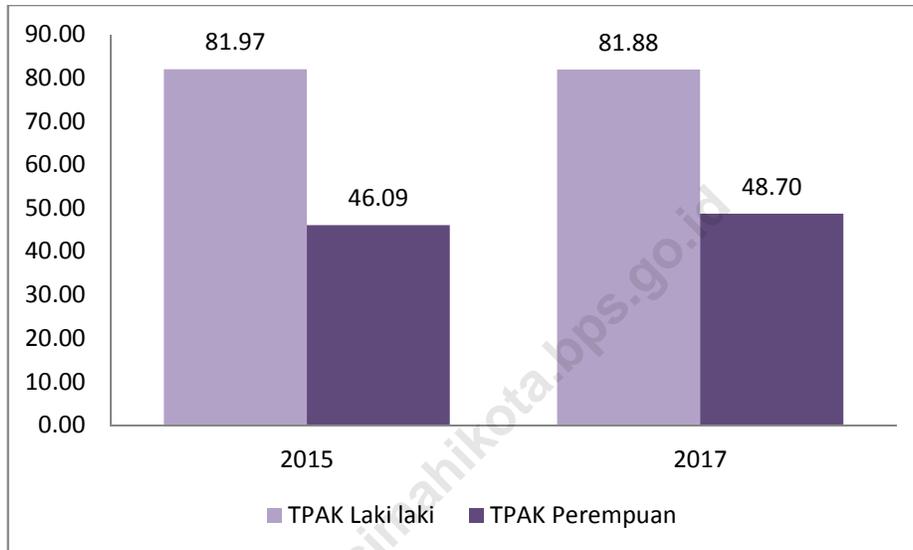


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Cimahi Agustus 2015 dan 2017

Dari total angkatan kerja sebanyak 454.659 orang pada Agustus 2017, sebanyak 91,57 persennya melakukan aktivitas bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan

tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

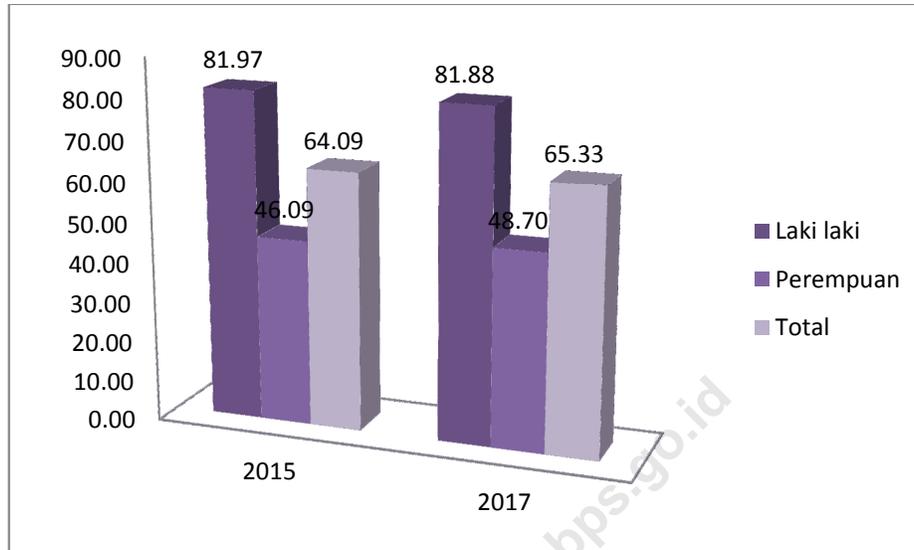
Grafik 4.2 Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Agustus 2015 – 2017



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Cimahi Agustus 2015 dan 2017

Dari jumlah angkatan kerja tersebut TPAK tahun 2017 bergerak naik dibanding tahun 2015. TPAK Kota Cimahi Agustus 2015 sebesar 64,09 persen, sedangkan Agustus 2017 sebesar 65,33 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa baik Agustus 2015 maupun Agustus 2017 TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan Agustus 2017 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 81,88 persen sedangkan TPAK perempuan 48,70 persen.

Grafik 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2015 – 2017



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2014- 2016

TPAK Kota Cimahi keadaan Agustus 2017 meningkat dari TPAK Agustus 2015, namun ternyata berdampak pula pada jumlah pengangguran yang mengalami perubahan. Jumlah penduduk yang mengangur, baik yang pernah bekerja maupun yang tidak pernah bekerja sebelumnya pada kondisi Agustus 2015 sebanyak 25.434 orang. Sedangkan kondisi Agustus 2017 menurun menjadi 25.033 orang. Nilai Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Cimahi kondisi Agustus 2015 mencapai 9,00 persen yang kemudian sedikit menurun pada kondisi Agustus 2017 menjadi 8,43 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penganggur laki-laki kondisi Agustus 2015 di Kota Cimahi sebanyak 18.081 orang yang kemudian berkurang 346 orang menjadi 17.735 orang pada kondisi Agustus 2017.

Sedangkan jumlah penganggur perempuan kondisi Agustus 2015 sebanyak 7.353 orang dan kondisi Agustus 2017 menurun menjadi 7.298 orang. Sedangkan jika dilihat TPT menurut jenis kelamin, TPT laki-laki cukup jauh lebih tinggi dari perempuan. Namun jika dibandingkan kondisi Agustus 2015 dengan Agustus 2017, TPT perempuan turun cukup signifikan dari 7,26 persen menjadi 6,61 persen sedangkan TPT laki-laki sedikit menurun dari 9,97 persen menjadi 9,50 persen.

Grafik 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2015 – 2017

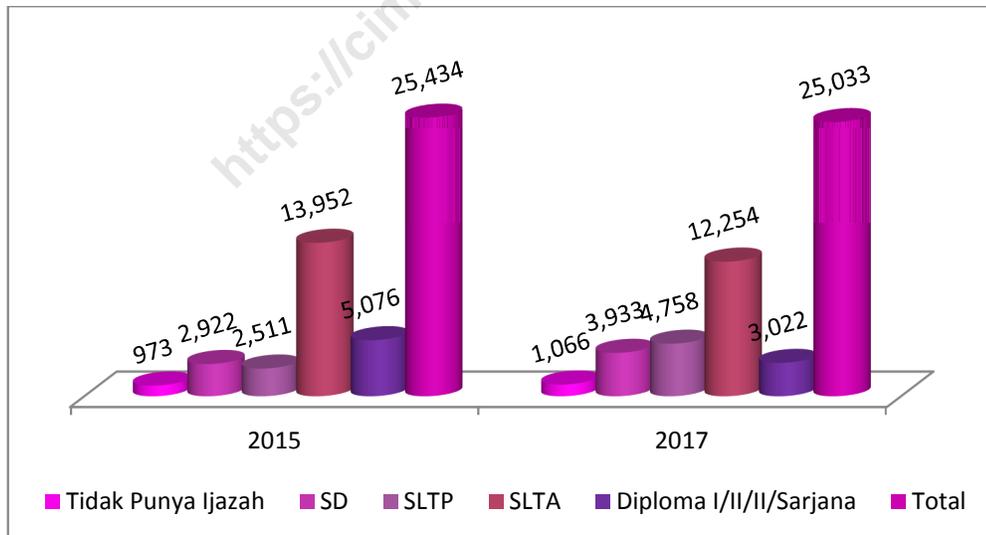


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2015-2017

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Grafik 4.5 Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, Agustus 2015-2017



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2015-2017

Jumlah penganggur di Kota Cimahi kondisi Agustus 2017 yang paling banyak adalah berijazah SLTA/Sederajat, yaitu mencapai 12.254 orang, terjadi penurunan jumlah pengangguran dibandingkan kondisi Agustus 2015 untuk yang berijazah SLTA/Sederajat sebanyak 13.952 orang.

Peningkatan jumlah penganggur terlihat pada penduduk yang memiliki ijazah SD/Sederajat dan yang memiliki ijazah SLTP/Sederajat dengan peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk penduduk dengan ijazah Diploma I/II/II/sarjana mengalami penurunan sangat signifikan dari 5.076 orang pada kondisi Agustus 2015 menjadi hanya 3.022 orang pada kondisi Agustus 2017.

Tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SD/Sederajat dan yang memiliki ijazah SLTP/Sederajat merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Cimahi. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2012, Pemerintah Kota Cimahi telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, meningkat dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Memacu tingkat pendidikan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, agar potensi yang dimiliki dapat berkontribusi positif dalam pembangunan.

Tahun 2017 TPT penduduk yang berijazah SMA Sederajat mencapai 9,61 persen, mengalami peningkatan sebesar 2,27 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan dalam periode setahun jumlah tenaga kerja lulusan SMA sederajat semakin banyak yang terserap lapangan usaha.

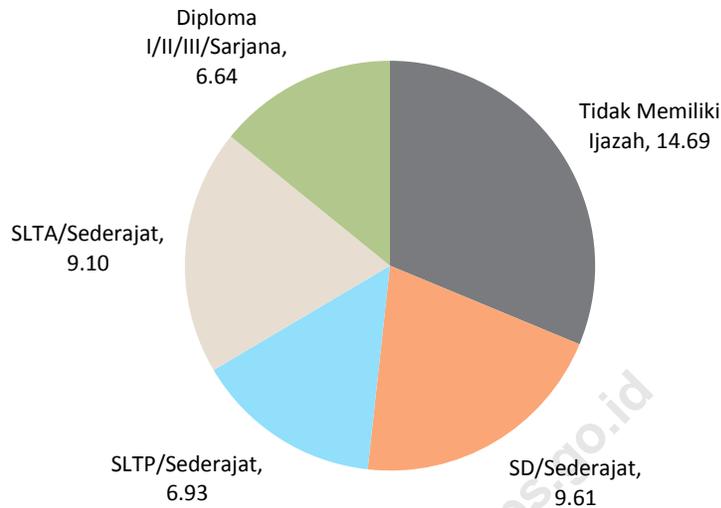
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Cimahi, 2015 – 2017

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Tidak memiliki ijazah	9.22	14.69
SD/ sederajat	7.34	9.61
SLTP/ Sederajat	5.09	6.93
SLTA/ sederajat	10.12	9.10
Diploma I/II/III/Sarjana	11.38	6.64
Total	9.00	8.43

Sumber : Sakernas Agustus 2015 - 2017

Dilihat dari komposisi penganggur menurut ijazah yang dimiliki, penganggur dengan ijazah Diploma I/II/III/Sarjana mencapai 6,64 persen dari total pengangguran terbuka. Penganggur lulusan SLTA/ sederajat juga memegang porsi cukup besar, yaitu mencapai 9,10 persen. Perlu upaya keras dari berbagai pihak melihat fenomena tersebut, dimana idealnya lulusan Diploma I/II/III/Sarjana dan lulusan SLTA/ sederajat akan lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.

Grafik 4.6 Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Cimahi, Agustus 2017



Sumber : Sakernas Agustus 2017

Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 5 lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Industri pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel; Jasa kemasyarakatan; dan Lainnya.

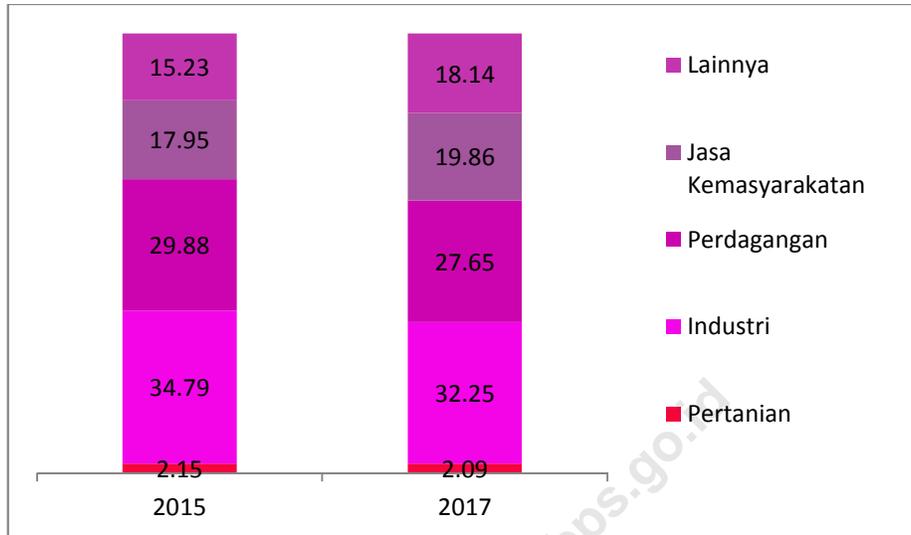
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, Agustus 2017) terlihat bahwa sebanyak 87.720 orang atau sekitar 32,25 persen tenaga kerja terserap pada lapangan usaha industri pengolahan. Kemudian sebanyak 75.218 orang atau 27,65 persen tenaga kerja terserap pada lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel.

Tabel 4.2 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2015 - 2017

Lapangan Usaha	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	5,533	5,694
Industri Pengolahan	89,435	87,720
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	76,833	75,218
Jasa Kemasyarakatan	46,156	54,032
Lainnya	39,148	49,353
Total	257,105	272,017

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2015-2017

**Grafik 4.7 Struktur Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Perkotaan
Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015**



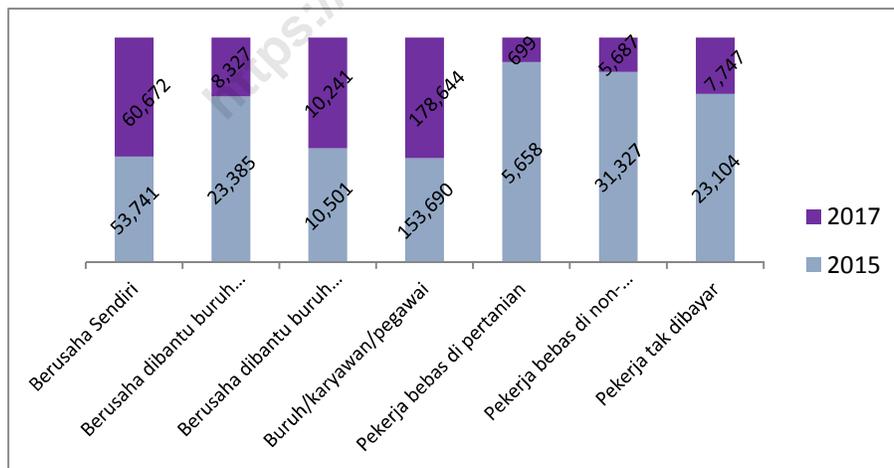
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Cimahi Agustus 2015-2017

Jumlah pekerja yang terserap pada lapangan usaha jasa lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan) pada Agustus 2017 mencapai 49.353 orang atau sebesar 18,14 persen yang meningkat cukup besar dari kondisi tahun sebelumnya. Hal sama juga terjadi pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan dimana pada kondisi Agustus 2015 menyerap tenaga kerja 46.156 orang atau 17,95 persen menjadi 54.032 orang atau 19,86 persen pada tahun 2017. Peningkatan penyerapan tenaga kerja jasa lainnya dan jasa kemasyarakatan menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi wilayah Kota Cimahi. Perekonomian bergeser dari perdagangan dan industri ke lapangan usaha jasa lainnya dan jasa kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari turunnya daya serap tenaga kerja dari perdagangan dan industri.

Keadaan Agustus 2017 daya serap lapangan usaha industri pengolahan mencapai 87.720 orang atau sekitar 32,25 persen, sedangkan kondisi Agustus 2015 sebanyak 89.435 orang atau menyerap 34,79 persen tenaga kerja. Hal yang sama pada lapangan usaha perdagangan yang menurun dari 76.833 orang atau 29,88 persen tenaga kerja yang diserap pada kondisi Agustus 2015 menjadi 75.218 orang atau 27,65 persen pada kondisi Agustus 2017.

Hal tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang beralih dari lapangan usaha industri dan perdagangan ke lapangan usaha jasa lainnya dan jasa kemasyarakatan. Peningkatan penduduk yang bekerja di lapangan usaha jasa lainnya dan jasa kemasyarakatan dapat diartikan bahwa kedua lapangan usaha ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

Grafik 4.8 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, Agustus 2015 – 2017

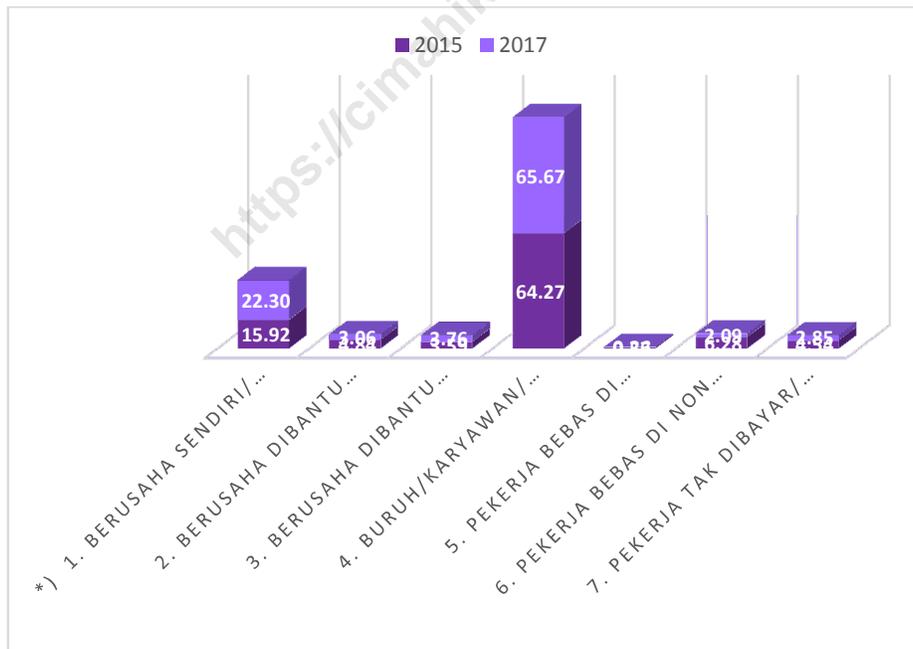


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014-2015

Selama periode Agustus 2015 hingga Agustus 2017 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada Agustus 2017 mencapai 178.644 orang atau sebesar 65,57 persen. Bila dibandingkan dengan Agustus 2015 mengalami peningkatan sebanyak 7,5 persen.

Peningkatan juga terjadi pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar. Peningkatan yang terjadi masing-masing sebesar 22,30 persen dan 3,76 persen dibandingkan Agustus 2015. Sedangkan untuk status pekerjaan utama lainnya mengalami penurunan.

Grafik 4.9 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Agustus 2015 – 2017



Sumber : Keadaan Anakatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2015-2017

4.4 Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*)

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) usaha sendiri informal dan (2) pekerjaan upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan

anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Buku Pedoman Pencacah Survei Sektor Informal 2014, BPS).

Tabel 4.3 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2015 – 2017

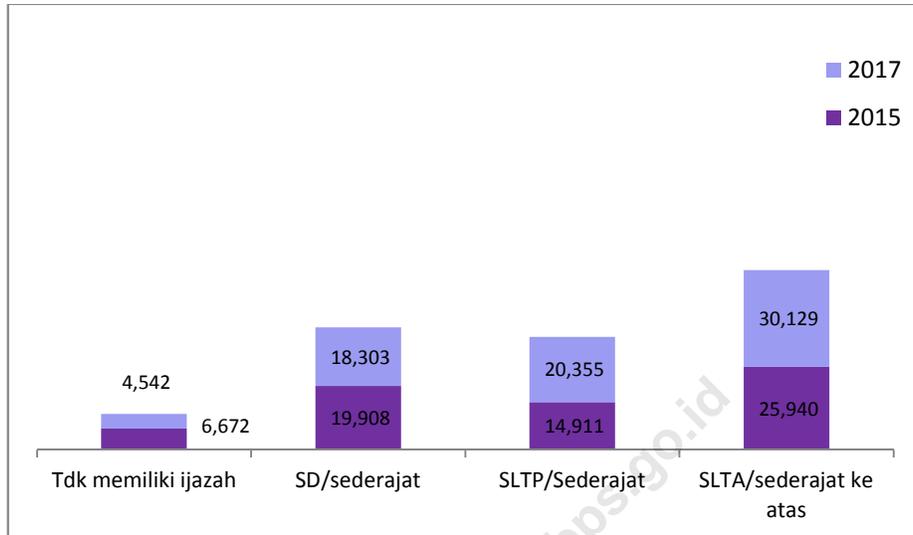
Jenis Pekerja	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Total Pekerja Informal	67.431	83.132

Sumber : Sakernas Agustus 2015 - 2017

Penduduk Kota Cimahi yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal selama periode 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada keadaan Agustus 2014 jumlah penduduk bekerja pada sektor informal pada kondisi Agustus 2015 sebanyak 67.431 orang menjadi 83.132 orang pada kondisi Agustus 2015.

Namun jika dilihat dari persentase terjadi peningkatan pada sektor informal sebesar 23,28 persen.

Grafik 4.10 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Status Kegiatan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2017



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2017

Keterlibatan penduduk dalam dunia pekerjaan cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki kecenderungan seseorang untuk bekerja pada sektor informal. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, sebanyak 30.129 orang penduduk bekerja berijazah SLTA ke atas bekerja pada sektor informal. Kemudian sebanyak 20.355 orang penduduk bekerja berijazah SLTP ke bawah bekerja pada sektor informal.

5 Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur

tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2017

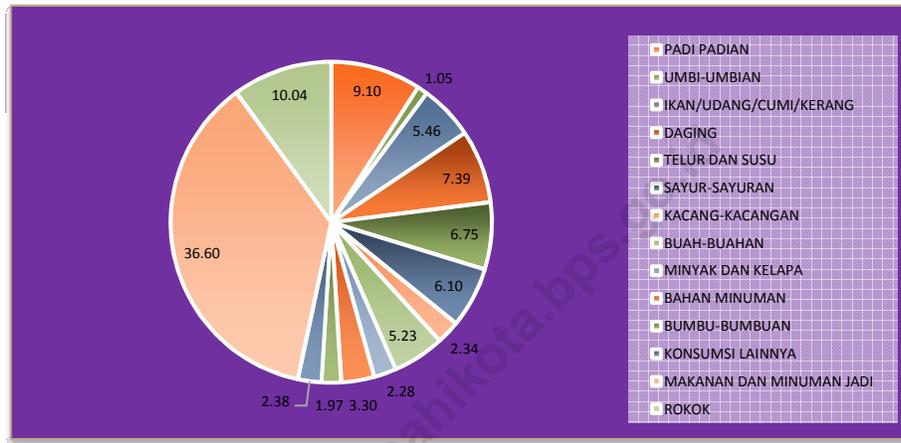
Golongan Pengeluaran (rupiah)	Kelompok Barang		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
< 300.000	158.185,90	106.256,31	264.442,21
300.000 – 499.999	220.351,04	182.444,62	402.795,67
500.000–699.999	342.968,74	300.300,49	643.269,23
700.000–899.999	382.415,65	426.203,75	808.619,40
> 900.000	758.916,23	1.212.162,30	1.971.078,52
Rata-rata	502.010,92	695.584,28	1.197.595,20

Sumber : Susenas Modul Konsumsi, Maret 2017

Tabel 5.1 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Cimahi sebesar Rp. 1.197.595,20 yang dibagi menjadi Rp. 502.010,92 untuk makanan dan Rp. 695.584,28 untuk bukan makanan. Jika dilihat berdasarkan golongan pengeluaran, golongan pengeluaran di bawah Rp. 900.000,00 dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan lebih banyak digunakan untuk makanan. Sedangkan untuk golongan pengeluaran di atas Rp. 900.000,00

pengeluaran bukan makanan lebih besar dari pengeluaran makanan. Grafik 5.1 memperlihatkan proporsi pengeluaran rata-rata menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang.

Grafik 5.1 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2017



Sumber : Susenas Modul Konsumsi, Maret 2017

Jika kelompok makan dirinci menurut sub kelompoknya, terlihat pada tabel 5.2 bahwa sub kelompok makanan dan minuman jadi kondisi Maret 2017 menjadi sub kelompok dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi dibandingkan sub kelompok Makanan dan minuman jadi yaitu Rp. 227.073. Diikuti sub kelompok tembakau dan sirih sebesar Rp. 62.316 dan padi-padian sebesar Rp. 56.458. Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk Kota Cimahi banyak mengkonsumsi makanan jadi, perlu menjadi dukungan pemerintah dengan didirikan pusat kuliner makanan khas Kota Cimahi sebagai salah satu penunjang pendapatan kota Cimahi.

**Tabel 5.2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Kelompok Makanan Sebulan
Menurut Sub Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2017**

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
(1)	(2)
Padi-padian	56.458
Umbi-umbian	6.503
Ikan	33.876
Daging	45.844
Telur dan susu	41.888
Sayur-sayuran	37.855
Kacang-kacangan	14.536
Buah-buahan	32.473
Minyak dan lemak	14.171
Bahan minuman	20.471
Bumbu-bumbuan	12.251
Konsumsi lainnya	14.782
Makanan dan minuman jadi	227.073
Tembakau dan sirih	62.316
Jumlah	620.496

Sumber : Susenas Modul Konsumsi, Maret 2017

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil

pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan indikator yang sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Grafik 5.2 Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2013 – 2017



Sumber : Tabel Dinamis Gini Rasio Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari grafik 5.2, indeks gini Kota Cimahi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016 0,40 dari 0,42 pada tahun 2015. Namun tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,37. Dengan melihat angka ini, pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi ada pada tingkat ketimpangan sedang.

6. Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga dapat rumah menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Data hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya penurunan walaupun sangat sedikit. Pada tahun 2016, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,71 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 99,99 persen.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Indikator Kualitas Perumahan, 2016 dan 2017

Indikator	Satuan	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah	%	99,71	-
Atap beton, genteng dan asbes	%	99,28	99,25
Dinding terluas tembok dan kayu	%	98,89	99,84
Rata-rata luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$	m^2	70,17	-

Sumber : Susenas, 2017

Selain luas lantai, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas 2016 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, dan asbes mencapai 99,28 persen dan pada tahun 2017 sedikit menurun menjadi 99,25 persen akan tetapi kondisi sebaliknya terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu yang naik dari 98,89 persen menjadi 98,84 persen pada tahun 2017.

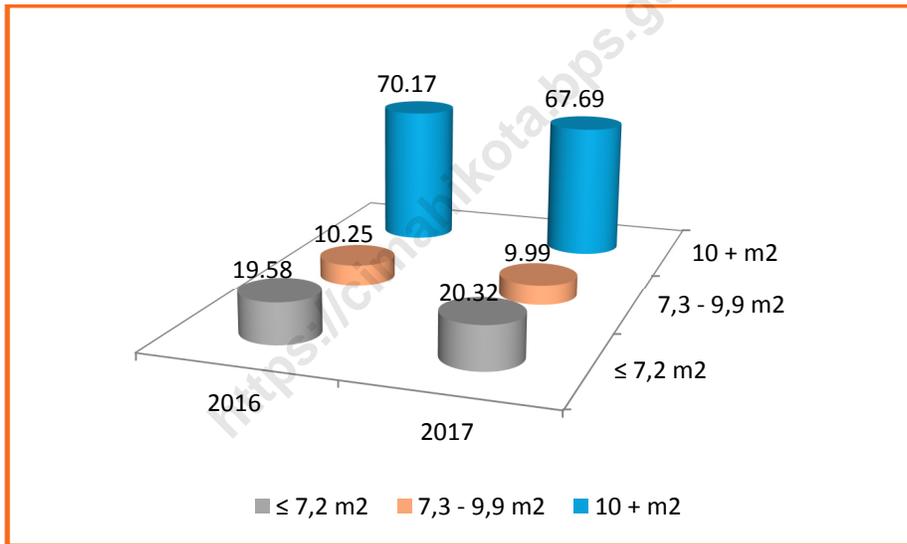
Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Berkaitan dengan kriteria WHO tersebut, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Data hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa di Kota Cimahi persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m² adalah sebesar 67,69 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2016, maka terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m² yang mencapai 2,68 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang belum seimbang dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat untuk

memperoleh rumah yang lebih sesuai dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Persentase rumah tangga menurut luas lantai perkapita di Kota Cimahi dapat dilihat pada Grafik 6.1. Berdasarkan Grafik tersebut terlihat terjadi penambahan persentase rumah tangga dengan luas lantai $\leq 10 \text{ m}^2$ dari tahun 2016 ke tahun 2017. Penambahan persentase terbanyak pada luas lantai per kapita $10+ \text{ m}^2$.

Grafik 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2016 dan 2017



Sumber : Susenas, 2017

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-

fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Tabel 6.2. Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan,
Tahun 2016 -2017**

Indikator	Satuan	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan, air isi ulang & ledeng	%	66,87	69,45
Air minum bersih *)	%	81,25	82,32
Jamban sendiri	%	73,10	77,36
Jamban sendiri dengan tangki septik	%	63,67	71,51
Sumber penerangan listrik PLN	%	99,08	100,00
*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan *(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 m+			

Sumber : Susenas, 2017

Rumah tangga di Kota Cimahi tahun 2017 yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak mencapai 69,45 persen. Terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang dan ledeng dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sebesar 66,87 persen. Peningkatan ini terjadi selain karena semakin banyak pilihan merek air kemasan, berjamurnya depot-

depot air minum isi ulang juga karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan kesehatan khususnya dalam konsumsi air minum.

Selanjutnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2017 mencapai 82,32 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2016-2017 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sedikit meningkat dari 73,10persen menjadi 77,36 persen. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2017 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 71,51 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 63,67 persen.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa 100,00 persen rumah tangga di Kota Cimahi telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN. Dengan angka ini bisa dikatakan seluruh masyarakat Kota Cimahi sudah menikmati fasilitas listrik dari PLN.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 58,34 persen, sisanya 41,66 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 24,22 persen kontrak/sewa dan 17,44 persen bebas sewa/rumah dinas/lainnya.

**Tabel 6.3. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal,
2016 -2017**

Indikator	Satuan	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	%	58,34	63,17
Kontrak/Sewa	%	24,22	21,28
Bebas Sewa/Rumah Dinas/lainnya	%	17,44	15,55

Sumber : Susenas, 2017

Jika kita amati status kepemilikan rumah pada periode 2016 – 2017, maka dapat kita lihat bahwa rumah tinggal yang milik sendiri mengalami peningkatan sebesar 4,83 persen. Akan tetapi, terjadi penurunan pada rumah tinggal yang bebas sewa/rumah dan dinas/lainnya sebesar 2.94 persen. Begitu juga dengan status kepemilikan rumah tinggal yang kontrak/sewa pada periode tersebut juga menurun yaitu sebesar 1,89 persen.

7 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga

membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

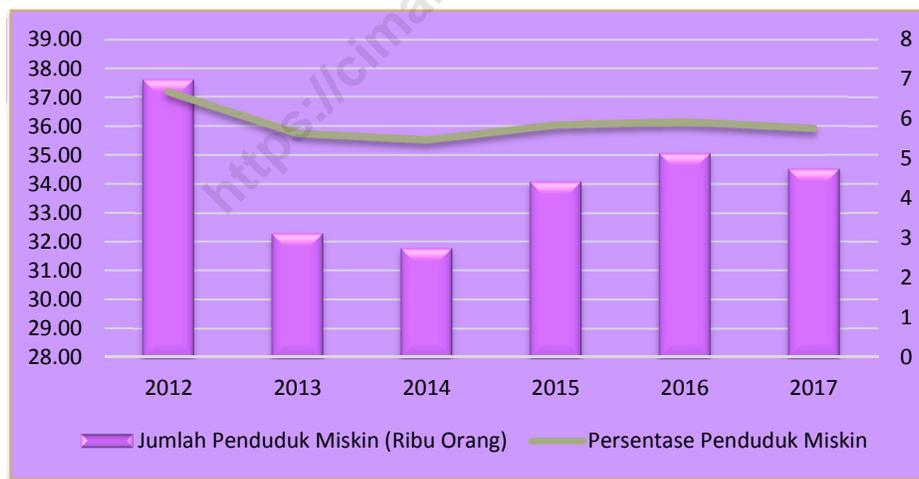
Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari

\$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2012-2017 (keadaan bulan Maret). Tahun 2012, jumlah penduduk miskin sebesar 37 ribu jiwa atau 6,67 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Cimahi. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan pada Maret tahun 2017 jumlah penduduk miskin sudah berkurang menjadi 34 ribu jiwa atau 5,76 persen dari jumlah penduduk.

Grafik 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2012-2017
(Maret, Ribuan Orang)



Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga;

kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2012-2017, tahun 2012 sebesar Rp 306.733 dan di tahun 2017 sebesar Rp 433.759.

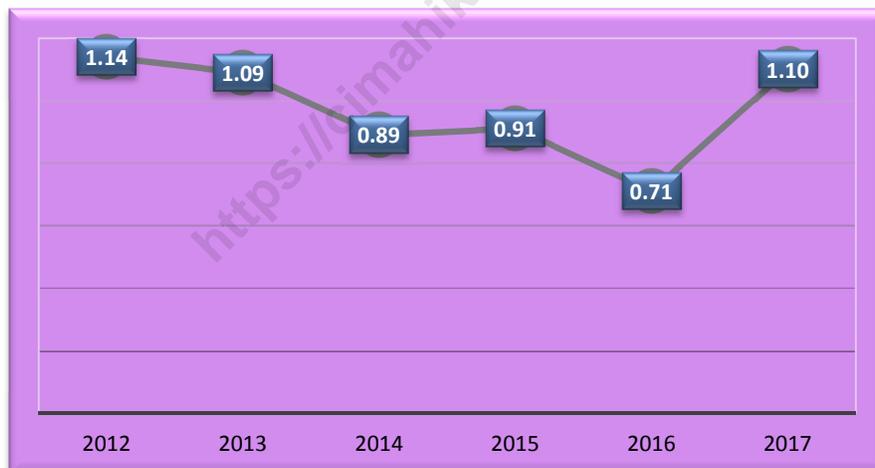
Grafik 7.2 Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2012 - 2017
(Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2012 – 2017 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2012 sebesar 1,14, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,09, kemudian tahun 2014 kembali menurun menjadi 0,89. Setelah itu periode 2015 mengalami kenaikan 0,91, lalu ada penurunan kembali di tahun 2016 menjadi 0,7. Dan kemudian di tahun 2017 ini mengalami kenaikan kembali menjadi 1,10. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

**Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cimahi
2012 - 2017**

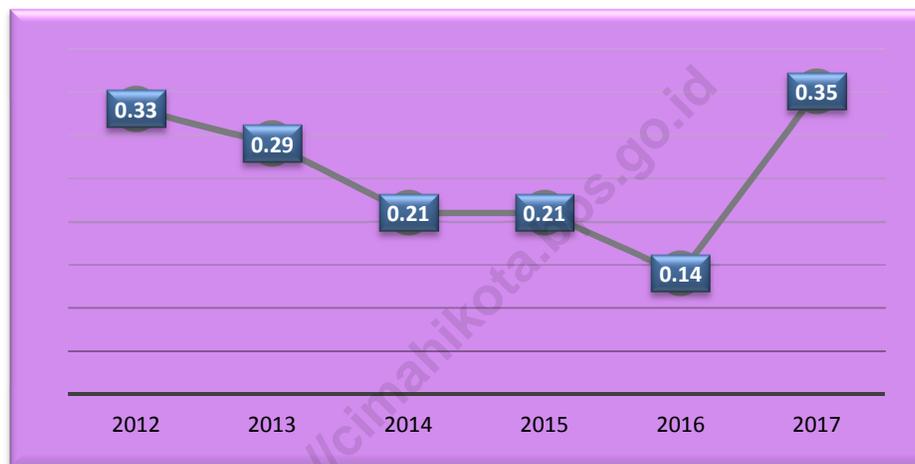


Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga

mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2012 – 2013 mengalami penurunan, kondisi yang sama ada di periode 2014 – 2015, adapun periode 2016 – 2017 terjadi kenaikan dari 0,14 menjadi 0,35. Penurunan dan kenaikan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kota Cimahi, 2012 - 2017



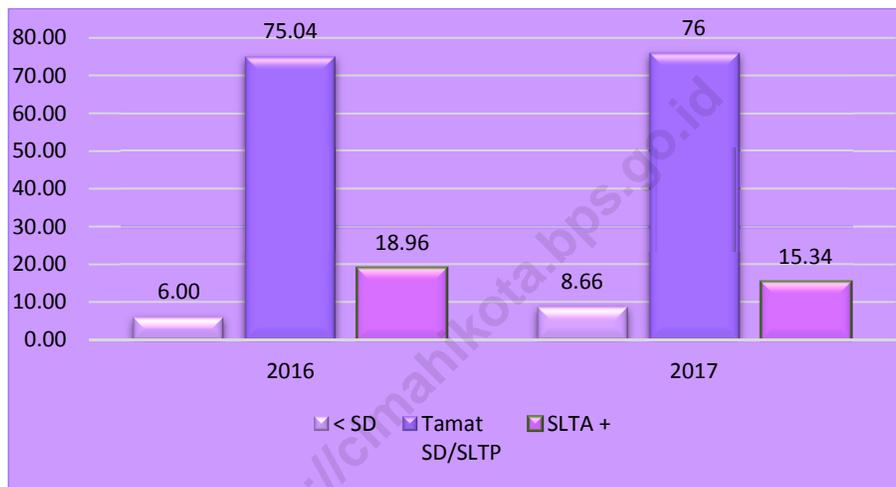
Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

7.3 Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang

perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Grafik 7.5 Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2016 - 2017



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017, BPS

Persentase penduduk miskin di Kota Cimahi menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2017 menunjukkan sebagian besar penduduk miskin adalah tamat SLTP ke bawah. Sebanyak 76 persen penduduk miskin tamat SD/SLTP dan sederajat. Kemudian 8,66 persen penduduk miskin adalah tidak tamat SD. Adapun penduduk miskin yang pendidikannya tamat SLTA/sederajat atau lebih mencapai 15,34 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesempatan rumah tangga untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan rumah tangga tersebut rentan dengan kondisi miskin.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka terlihat adanya penurunan taraf pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk miskin pada tingkat SLTA ke atas, dimana pada tahun 2016 sebesar 18,96 persen penduduk miskin yang tamat SLTA ke atas, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 15,34 persen.

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mencapai 51,32 persen pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka mengalami penurunan sebesar 3,25 persen yaitu dari 54,57 persen menjadi 51,32 persen.

Grafik 7.6 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2016 - 2017



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017, BPS

Berkurangnya persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tentunya berpengaruh pada peningkatan penduduk yang

bekerja. Dari 34 ribu penduduk miskin pada tahun 2017, seluruhnya bekerja pada sektor formal sebesar 46,68 persen. Jika dibandingkan antara tahun 2016 dan 2017, maka persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja yaitu dari 54,57 persen pada tahun 2016 menjadi 51,32 persen pada tahun 2017.

Grafik 7.7 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2016 – 2017



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017, BPS

Penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2017 sudah tidak ada lagi, mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1,18 persen. Perubahan ini mengindikasikan perpindahan lapangan pekerjaan informal sehingga banyak pekerja masyarakat beralih ke sektor formal, Hal ini tercermin dari meningkatnya persentase penduduk yang bekerja bukan disektor pertanian yang sebesar 44,25 persen pada tahun 2016, menjadi 48,68 persen pada tahun 2017.

7.5 Karakteristik Perumahan

Karakteristik rumah tangga miskin yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain pendidikan dan ketenagakerjaan adalah karakteristik

perumahan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin kualitas hidup masih rendah jika dilihat dari kelebihannya dalam beraktivitas di dalam rumah.

Ketersediaan fasilitas air minum dan jamban juga merupakan diantara karakteristik perumahan yang perlu mendapat perhatian. Di Kota Cimahi, persentase rumah tangga miskin yang mengakses air layak mencapai 97,45 persen pada tahun 2017. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung (<https://sirusa.bps.go.id>).

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih. Air bersih sebagai sumber air minum merupakan komponen penting dalam mendukung kehidupan yang lebih sehat. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010).

Ketersediaan sanitasi untuk setiap rumah tangga miskin di Kota Cimahi relatif belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan fasilitas jamban sendiri/bersama hanya sebesar 90,23 persen pada tahun 2017.

Grafik 7.8 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan JambanSendiri/Bersama Kota Cimahi , Tahun 2017



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017, BPS

7.6 Fasilitas yang Diterima Rumah Tangga Miskin

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya untuk rakyat miskin, banyak memberikan fasilitas-fasilitas demi meringankan beban rumah tangga miskin, di antaranya pemberian subsidi pada beras murah Raskin (Beras Miskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dapat digunakan untuk berobat.

Tabel 7.1 Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Raskin, Rata-rata Raskin dan Rata-rata Harga di Kota Cimahi, 2016-2017

Uraian	Satuan	2016	2017
Rumah tangga penerima raskin	%	84,40	18,28
Rata-rata raskin	Kg	5,81	9,72
Rata-rata harga	Rp	1.962	2.102

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kecamatan Tahun 2016-2017, BPS

Persentase rumah tangga miskin yang menerima raskin pada tahun 2016 mencapai 84,40 persen, kemudian menurun tajam pada tahun 2017 menjadi 18,28 persen. Namun Rata-rata beras raskin yang diterima mengalami kenaikan, dari 5,81 kilogram pada tahun 2016 menjadi 9,72 kilogram pada tahun 2017. Demikian juga harga beras raskin per kilogram yang dibayar rumah tangga miskin sedikit mengalami kenaikan dari Rp. 1.962 per kilogram menjadi Rp. 2.102 per kilogram.

<https://cimahikota.bps.go.id>

8 Sosial Lainnya

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Cimahi. Cakupan pembahasan meliputi data Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pelayanan Kesehatan

Pengertian akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

8.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena

praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Di tahun 2017 penggunaan telepon seluler menurun 2,86 persen dibandingkan tahun 2016, dari 79,86 persen menjadi 77,00 persen, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Telepon seluler mengalami penurunan.

Tabel 8.1. Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2016 dan 2017

Indikator	Satuan	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Seluler	%	79,86	77,00
Akses Internet	%	43,92	55,43

Sumber : Susenas 2016 dan Susenas 2017

Selanjutnya terkait penggunaan telepon Seluler, berdampak pada kemudahan akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2017 penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet sebesar 55,43 persen. Nilai ini meningkat sebesar 11,51 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini mengidentifikasi bahwa peningkatan penggunaan internet semakin meningkat.

8.2 Pelayanan Kesehatan Gratis

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan diantaranya adalah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat misalnya Program Puskesmas Gratis yang dianggarkan oleh

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik. Jumlah penerima jaminan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Berdasarkan hasil Susenas 2017, persentase rumah tangga yang memiliki atau penerima jaminan sosial Pensiun/Veteran sebanyak 12,72 persen. Penerima Jaminan Hari Tua sebanyak 14,59 persen, Penerima Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak 14,02 persen dan Penerima Jaminan/Asuransi kematian sebanyak 10,10 persen. Diharapkan dengan meningkatnya rumah tangga yang menerima jaminan pelayanan kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cimahi. Dengan meningkatnya derajat kesehatan diharapkan kapabilitas masyarakat untuk bisa hidup sejahtera juga akan meningkat.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir 2017

Indikator	Satuan	2017
(1)	(2)	(3)
Jaminan Pensiun/Veteran	%	12.72
Jaminan Hari Tu	%	14,59
Asuransi Kecelakaan Kerja	%	14,02
Jaminan/Asuransi Kematian	%	10,10

Sumber : Susenas, 2017

8.3. Kartu perlindungan Sosial dan Kartu keluarga Sejahtera

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan diantaranya adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/kartu keluarga sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013 yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik.

Pada periode tahun 2017, persentase rumah tangga yang menerima kartu perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) , yang dapat menunjukkan kartu sebanyak 5,43 persen, tidak dapat menunjukkan kartu sebanyak 3,40 persen, sedangkan yang tidak punya sebanyak 91,17 persen, seperti terlihat pada grafik 8.1.

Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2017



Sumber : Susenas, 2017

KERJA BERSAMA DENGAN DATA

<https://cimahikota.bps.go.id>

2018



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA CIMAHI
Jl. Entjep Kartawiria No. 20B Citeureup
Cimahi 40512
Telp./Fax: (022) 6645985.
e-mail: bps3277@bps.go.id
website : cimahikota.bps.go.id

